



## **Tantangan SPM : Menilik Mutu Pendidikan Sekolah Pedalaman di Ules Nusa Tenggara Timur**

**Mochamad Fuad Hasan Metarum**

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

E-mail : [hasanmetarum76@gmail.com](mailto:hasanmetarum76@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa standar pelayanan minimal dan upaya sekolah pedalaman dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif fenomenologis, yang melibatkan partisipan kepala sekolah, guru, siswa dan tenaga kependidikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dalam mencapai standar minimal pendidikan. Proses pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan minimal sudah diterapkan oleh pihak-pihak sekolah. Namun ada beberapa tantangan yang ditemukan sehingga tidak tercapainya mutu pendidikan yang ada yaitu : 1). Kurang tersedianya listrik, 2). Akses pendidikan, 3). Bantuan dana pendidikan dll. Upaya yang dilakukan oleh komite sekolah Ules Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar sebagaimana dijelaskan dalam beberapa aspek bidang, yaitu: bidang perencanaan, kurikulum dan evaluasi, bidang pengelolaan fasilitas, bidang pengelolaan pembiayaan, bidang sumber daya manusia. Peran komite sekolah, guru, staff, orang tua, masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan pendidikan melalui standar nasional pendidikan yang ditetapkan demi mewujudkan pendidikan bermutu.

**Kata Kunci:** Standar Pelayanan Minimal, Mutu Pendidikan, Sekolah Pedalaman.

### **Abstract**

*This study aims to examine and analyze minimum service standards and the efforts of rural schools in improving the quality of education. This study uses a phenomenological qualitative approach, which involves the participation of school principals, teachers, students and educational staff. Process data through interviews and documentation. The results showed that the minimum service standards had been implemented by school authorities. However, there were several challenges that were found so that the quality of the existing education was not achieved, namely: 1). Lack of electricity, 2). Access to education, 3). Education funding assistance etc. The efforts made by the East Nusa Tenggara Ules school committee in improving the quality of resource basic school education in several aspects of the field, namely: planning, evaluation and evaluation, management, financing management, human resource planning. The roles of school committees, teachers, staff, parents, communities and government are very much needed to support development through national education standards set in order to realize quality education.*

**Keywords:** Minimum Quality Standards, Quality Education, Rural Schools.

## PENDAHULUAN

Standar pelayanan minimal pendidikan (SPM) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. (Susanto dkk., 2020) SPM disusun untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata juga sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga diharapkan dengan adanya standar pelayanan minimal pendidikan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Vitri dkk., 2019).

Berdasarkan otonomi pengelolaan pendidikan di lingkungan sekolah maka peran pemerintah bergeser dari regulator menjadi fasilitator. Keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan ini hanya mencakup dua aspek, yaitu mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan, dan berupaya agar semua siswa dapat berprestasi setinggi mungkin. Juga berupaya agar semua sekolah dapat mencapai standar minimal mutu pendidikan, dengan keragaman prestasi antara sekolah dalam suatu lokasi sekecil mungkin. Pemerintah harus menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh siswa dari semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. (Usman, 2017) Secara keadaan geografis, provinsi Nusa Tenggara timur terdapat penyebutan kota dan pedalaman, penyebutan kata pedalaman bukan mendeskreditkan suatu daerah namun lebih menonjolkan letak daerah yang memang jauh dari pusat kota. Daerah inilah yang memerlukan perhatian dalam pemerataan pembangunan daerah dengan keterbatasan transportasi, infrastruktur dan juga memerlukan tenaga pengajar yang mau mengajar disana. (Hermansyah dkk., 2020) Data badan pusat statistik menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) untuk NTT yang antara lain salah satu indikatornya terkait pendidikan berada di urutan 32 dari 34 provinsi atatau hanya bisa mengungguli papua dan papua barat. ("Mutu Rendah Pendidikan di NTT, Apa Pemicunya?," 2017).

Perlunya standar nasional pendidikan dalam penentuan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan tujuan ditetapkannya standar pendidikan ini adalah untuk menjami mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak bangsa bermartabat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan ini menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran program untuk mencapai target masing-masing lembaga pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan standar atau pedoman teknis perencaan yang berlaku. Mengacu permasalahan yang telah dipaparkan akan dibahas mengenai tantangan penggunaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lembaga pendidikan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan acuan standar nasional pendidikan. Serta temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan usulan terkait peningkatan mutu pendidikan di Ules Nusa Tenggara Timur.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif fenomenologis. Fenomenologis merupakan sebuah penelitian yang menjelaskan makna konsep atau fenomena yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana terfokus pada upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah dalam mencapai standar minimal pendidikan. (Kurniady, 2011) Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisa data dan informasi dari studi pendahuluan.

Penggunaan analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang peran komite sekolah, guru, siswa, staff kependidikan, orang tua siswa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dalam mencapai standar minimal pendidikan.

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah pedalaman Ules Nusa Tenggara Timur dengan kurun waktu Mei sd Agustus 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik Triangulasi data dengan membandingkan data-data yang sudah didapat dari sumber kepada sumber yang lain agar tercapainya keabsahan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah kota atau kabupaten. Standar pelayanan minimal pendidikan merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota atau kabupaten, kementerian agama regional masing-masing daerah yang tersebar secara langsung maupun tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. Tujuan dari adanya standar minimal pendidikan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah atau madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan guna menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar yang memadai, serta mampu mempersempit kesenjangan mutu pendidikan di masa depan dengan semakin banyak muncul kebutuhan baru yang menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. (Sabdaningtyas, 2018) Standar pelayanan minimal pendidikan dasar dikembangkan sejalan dan berdasarkan standar nasional pendidikan, serta terdapat instrumen standar nasional pendidikan yang mencakup delapan standar yakni standar isi, sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, evaluasi pendidikan dan kompetensi lulusan. (Hidayati dkk., 2013)

Sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2013 tentang perubahan atas permendiknas nomor 15 tahun 2010 bahwasannya penyelenggara pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil dan keuangan ditingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan satuan pendidikan. (Syafingi, 2017) Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Permendikbud no 23 tahun 2013 tentang standar pelayanan pelayanan minimal (SPM) yang dibagi dalam beberapa sektor yang meliputi :

Sektor pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten atau kota: 1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTS dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil, 2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTS tidak melebihi 36 orang., 3) Setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus empat orang setiap satuan Pendidikan, 4) Setiap SMP dan MTS tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan minimal satu set alat praktek IPA sebagai demonstrasi eksperimen peserta didik, 5) Setiap SMP/MTS tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pendidikan Kewarganegaraan, 6) Setiap SMP/MTS tersedia satu orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru disetiap rumpun mata pelajaran dan 7) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. (Sukaman dkk., 2019)

Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan : 1) Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik, 2) Setiap SMP/MTS menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia, contoh peralatan optik, alat eksperimen IPA dasar, dan poster IPA, 3) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan, 4) Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya, 5) Kepala sekolah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas serta ujian akhir kepada orang tua peserta didik juga menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten atau kota pada setiap akhir semester dan 6) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. (Eti Setiawati, 2017).

Dengan adanya SPM, harapan masyarakat untuk mendapatkan suatu standar pelayanan dasar yang sama di lokasi manapun mereka tinggal dan menuntut pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada lembaga pendidikan atau terkhususkan kepada masyarakat yang tinggal di pelosok daerah. (Eti Setiawati, t.t.) SPM bakal menjadi *entry point* atas kurang memuaskannya aspek pelayanan pendidikan selama ini, mengenai birokrasi yang lamban, berbelit-belit, kurang meratanya pendidikan yang berkualitas dan kadang diwarnai beragam pungutan dari lembaga pendidikan.

Peningkatan mutu merupakan tugas yang paling utama dihadapi oleh berbagai lembaga, jika hendak dianalisis masalah-masalah yang terkait dengan kajian pendidikan setidaknya ada 4 hal yang menjadi titik fokus dalam kajian pendidikan yaitu ; pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, relevansi pendidikan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Seharusnya dalam pemecahan persoalan masalah pendidikan tidak dilakukan secara parsial akan tetapi dilakukan secara menyeluruh. (Idrus, 2012) Pemerintah daerah atau kepala sekolah yang di kota ataupun berada di pedalaman senantiasa untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah untuk bisa bertanggungjawab memberikan pelayanan serta mutu pendidikan kepada masyarakat secara layak dan memenuhi standar minimal tertentu. (Moerdiyanto \*, 2005).

Menurut Baeby bahwa mutu pendidikan terdiri dari tiga perspektif yaitu: perspektif ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Berdasarkan perspektif ekonomi, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lulusan pendidikan yang bermutu akan secara langsung dapat memenuhi angkatan kerja, yang secara ekonomi akan membantu peningkatan taraf hidup. Menurut pandangan sosiologi, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat terhadap pengembangan dan kemajuan masyarakat, seperti mobilitas sosial, perkembangan budaya, pertumbuhan kesejahteraan, dan pembebasan kebodohan. Menurut pandangan pendidikan, mengarah kepada upaya sekolah dalam memenuhi kebutuhan hak peserta didik, kesejahteraan tenaga pendidik dan kepuasan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa sekolah. (Jamali, 2016) Menurut Usman adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu :

Aspek pengelolaan proses belajar mengajar. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pembelajaran sebagai proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dapat juga diartikan suatu upaya untuk mengarahkan timbulnya perilaku belajar pembelajar, atau dengan ungkapan lain upaya untuk membelajarkan pembelajar. (Muhammad Ali, 2008) Proses belajar merupakan kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di madrasah. Secara umum, metode pembelajaran dan pengajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) lebih mampu memberdayakan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa, bukan pada keaktifan mengajar guru. Oleh karena itu kepala madrasah perlu menerapkan cara-cara belajar siswa aktif seperti *active learning*,

cooperative learning, dan quantum learning perlu diterapkan. Menurut Crosby ada beberapa langkah dalam sebuah program mutu, yaitu : a) Komitmen manajemen, b) membangun tim peningkatan mutu, c) pengukuran mutu, d) penyusunan tujuan, e) perencanaan tanpa cacat, f) pelatihan pengawas, g) mendirikan dewan-dewan mutu. (Edward Sallis, 2012).

Perencanaan dan Evaluasi . Madrasah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya (school-based plan). Kebutuhan yang dimaksud misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu madrasah. Menurut Nawawi sebagaimana yang dikutip Ahmad Sabri rencana yang perlu disusun oleh oleh madrasah dalam konteks pendidikan meliputi: a) Perumusan tujuan yang hendak dicapai, b) Penentuan bidang atau fungsi unit sebagai bagian yang akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, c) Menetapkan jangka waktu yang diperlukan, d) Menetapkan metode atau cara penyampaian tujuan, e) menetapkan alat- alat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan, f) merumuskan rencana evaluasi atau penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, dan g) menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan.(Ahmad Sabri, 2007).

Pengelolaan Kurikulum. Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, maka seluruh komponen-komponen pendidikan mestilah berkualitas. Diantara komponen yang penting untuk menuju pendidikan yang berkualitas itu adalah adanya kurikulum madrasah yang dibuat oleh madrasah sebagai sebuah pedoman dan arah dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. (Nana Sujana, 2008) Kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional, sementara kondisi madrasah pada umumnya beragam maka dalam implementasinya, madrasah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi) kurikulum tersebut, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Madrasah dibolehkan memperdalam kurikulum, artinya, apa yang diajarkan boleh dipertajam dengan aplikasi yang bervariasi. Sekolah juga dibolehkan memperkaya apa yang diajarkan, artinya apa yang diajarkan boleh diperluas dari yang harus, dan seharusnya, dan yang dapat diajarkan. Demikian juga, sekolah dibolehkan memodifikasi kurikulum, artinya apa yang diajarkan boleh dikembangkan agar lebih kontekstual dan selaras dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, madrasah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

Pengelolaan fasilitas. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga pengembangan sekolah. Hal ini didasari bahwasannya sekolah yang paling tahu kebutuhan fasilitas, baik kesesuaian, kecukupan maupun kelayakannya terhadap fasilitas proses belajar mengajar. Pada dasarnya sekolah umum yang pada umumnya berstatus negeri dan dengan statusnya itu seluruh pembiayaan, ketenagaan, semua kebutuhan fasilitas tercukupi oleh pemerintah dibandingkan dengan prestasi madrasah yang pada umumnya berstatus swasta dan tidak memperoleh fasilitas sebagaimana yang diterima oleh sekolah umum pada umumnya. Minimnya fasilitas yang diberikan pada, membuat kepala sekolah perlu melakukan strategi dan usaha pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhannya.(Usman, 2017).

Pengelolaan pembiayaan Dalam hal kegiatan pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh pemerintah kepada kepala sekolah secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian atau penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Sekolah juga diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah. (Hasanah, 2017) Anggaran yang didapatkan dari pemerintah bisa digunakan untuk sarana dan prasarana, pengadaan buku kurikulum 2013, insentif guru honorer pelatihan atau workshop.

Achmad mengemukakan bahwa mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan sekolah secara operasional dan efisien terhadap komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap norma atau standar yang berlaku.(Kurniady, 2011) Didapatkan satu perspektif baru dari pengembangan teori Ripley dan Franklin bahwa keberhasilan

implementasi suatu program sangat ditentukan oleh peran aktif masing-masing dan sejauh mana program diimplementasikan yang terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia, adanya aturan jelas, kesediaan dana, kesediaan perangkat utama program, faktor pendukung dan penghambat proses implementasi program.(Prasetya dkk., 2018).

Implementasi pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan di Sekolah pedalaman ULES mengacu pada terselenggaranya kegiatan yang meliputi : a.) Tersedianya buku teks pelajaran di ULES yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Pendidikan Agama Islam dengan satu paket dibagikan untuk setiap peserta didik. b.) Tersedianya alat-alat untuk praktikum dan alat peraga dalam pembelajaran guna untuk menunjang kegiatan pembelajaran di ULES, untuk itu pihak sekolah menyediakan alat-alat peraga praktikum seperti peta dunia (globe), kerangka manusia, model tubuh manusia, tabung raksa untuk eksperimen reaksi kimia dasar dan poster IPA. c.) tersedianya buku refrensi mata pelajaran ataupun non mata pelajaran karena sangat diperlukan sebagai tambahan refrensi dan pengayaan pembelajaran baik bagi siswa atau guru untuk memperluas wawasan keilmuan pada bidang tertentu. Sekolah Dasar Negeri Ules mewujudkan hal itu dengan menambah koleksi buku-buku di perpustakaan. d.) kurikulum yang digunakan adalah K13 dengan mengkombinasikan rancangan kurikulum dari sekolah sesuai prosedur yang telah ditentukan dan kemudian disahkan oleh komite sekolah. Rancangan kurikulum sekolah sudah memenuhi persyaratan dengan tingkat satuan jenjang pendidikan yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh pemerintah kota atau dinas pendidikan kota Flores Nusa Tenggara Timur.

Ada beberapa tantangan penyelenggaraan SPM yang ditemukan di sekolah pedalaman Ules Nusa Tenggara Timur ialah a). Kurang tersedianya listrik sehingga pembelajaran tidak bisa dilaksanakan berbasis multimedia, dari pihak sekolah sudah menyediakan *charger* atau genset akan tetapi terkendala keuangan sekolah untuk keperluan sekolah habis dibuat membeli solar untuk menyalakan genset, b). Ada beberapa siswa yang pergi ke sekolah sekitar 5 jam perjalanan waktu tempuh dari tempat tinggalnya dan ada siswa juga untuk menempuh harus melewati gunung yang kurang lebih perjalanan 3 jam, c). Fasilitas penunjang yang disediakan oleh pemerintah seperti peta dunia, alat peraga, dll sudah rusak, d). Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kurang merata bagi setiap siswa yang kurang mampu. Terlaksananya standar minimal pendidikan tidak lepas dari peran serta seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan proses pelaksanaan SPM di sekolah pedalaman Ules Nusa Tenggara Timur. Sekolah sudah melibatkan semua komponen dari komite sekolah, peran serta masyarakat, guru dan pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan Flores Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, pelaksanaan standar pelayanan pendidikan masih kurang maksimal untuk dilakukan oleh Lembaga pendidikan tersebut. Dibalik adanya beberapa tantangan dalam penyelenggaraan SPM, adapun upaya yang dilakukan oleh komite sekolah Ules Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar sebagaimana dijelaskan dalam beberapa aspek bidang, yaitu:

1. Bidang perencanaan, kurikulum dan evaluasi berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan, bahan ajar, proses pengajaran serta evaluasi baik secara keseluruhan program pendidikan sekolah di Ules maupun untuk setiap bidang studi. Upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan menyiapkan model pembelajaran, penggunaan kurikulum K13 dalam proses belajar mengajar serta adanya evaluasi hasil belajar melalui hasil nilai ujian serta perubahan tingkah peserta didik melalui penilaian dari guru dan wali murid. Sesuai dengan peraturan menteri Nomor 15 Tahun 2010 yaitu pengembangan penilaian yang dilakukan oleh guru untuk menilai pengembangan program penilaian baik secara kognitif maupun afektif. Melalui K13 sebagai penguatan pendidikan karakter untuk di aplikasikan dalam setiap mata pelajaran, salah satu konkritnya adalah suri tauladan yang baik dari guru sehingga bisa langsung ditiru oleh peserta didik. Mengadakan kontrolling melalui UPT karena hal itu sangat dibutuhkan untuk melihat sejauh mana pendidikan berjalan dengan baik. Jika ada kesalahan atau masalah bisa segera dikomunikasikan dan dicari solusi pemecahannya.

2. Bidang pengelolaan fasilitas, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Banyak dari fasilitas yang diberikan sudah mengalami kerusakan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki sarana dan prasarana serta mengajukan bantuan sarana dan prasaran kepada pemerintah Flores. Pengadaan buku sebagai alat penunjang pembelajaran karena buku adalah sumber ilmu kedua setelah guru.
3. Bidang pengelolaan pembiayaan, upaya yang dilakukan dengan cara setiap awal tahun ajaran baru mengadakan pelatihan dan pembinaan seperti diklat, workshop dan jenis pelatihan lainnya untuk mengevaluasi program dan anggaran tahun sebelumnya. Meteri evaluasi ini digunakan sebagai pedoman untuk menyusun program dan anggaran di tahun ajaran baru berikutnya.
4. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan mutu SDM dengan mengirim tenaga pendidik mengikuti pelatihan-pelatihan program pendidikan yang diselenggarakan dinas pendidikan daerah agar menjadi tenaga pengajar profesional. Serta mengadakan pelatihan dan pembinaan seperti diklat, *workshop*, pendampingan KKG untuk mencetak guru yang berkualitas dan berprestasi.

Guna mencapai SPM dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu beberapa langkah yang diperlukan. Pelaksanaan SPM di sekolah pedalaman ules sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi dan kendala-kendala itu masih memungkinkan untuk diselesaikan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di Sekolah Pedalaman Ules Nusa Tenggara Timur adalah kurang aktifnya wali murid dan kondisi sosial ekonomi dari wali murid. Bentuk keterlibatan wali murid dalam pelaksanaan proses belajar mengajar berupa sumbangan materi dan keterlibatan manajemen mutu dengan kurang maksimal, mereka mempercayakan segala sesuatu kepada komite sekolah. Komite sekolah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan peningkatan manajemen mutu pendidikan melalui dukungan moril ataupun materil yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dalam pendidikan, namun perlu adanya dukungan pengawas sekolah dan dinas pendidikan Flores memberikan bimbingan teknis pelaksanaan SPM serta merespon proposal usulan bantuan yang diajukan sekolah pedalaman di Ules Nusa Tenggara Timur agar upaya mutu pendidikan melalui SPM bisa terlaksana dengan baik. Situasi ini seharusnya tidak terjadi, untuk itulah hendaknya dibuat sebuah kebijakan utama yaitu peningkatan mutu pendidikan.

Dari pengelolaan SDM berupa tenaga pengajar dan pendidik banyak ditemukan yang tidak sesuai kualifikasi yang sudah ditetapkan secara nasional. Dari tentor yang tidak sesuai dengan kualifikasi maka proses pembelajaran tidak berjalan semestinya. Seharusnya pembelajaran didukung dengan RPP, evaluasi pembelajaran dan lainnya tetapi kenyataannya tidak dijalankan dengan baik. Untuk meningkatkan SDM yang dapat dilakukan adalah optimalisasi dari dinas pendidikan dan pengelola lembaga untuk meningkatkan kompetensi guru profesional yang mana harus adanya tentor salah satunya adalah memenuhi kualifikasi tentor sesuai dengan kualifikasi nasional. Begitu halnya dengan kebijakan pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan pembiayaan sekolah adalah melaksanakan pembiyaan pendidikan yang adil untuk masyarakat. (Aisyiah dkk., 2020).

Dalam pengembangan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur, perlu diperhatikan beberapa faktor yang mejadi prioritas utama yaitu: efektivitas proses belajar mengajar yang pada kenyataannya sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana belajar, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, metode pengajaran serta manajemen pendidikan. Juga diperlukan peran orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk mendukung pembangunan pendidikan melalui standar nasional pendidikan yang ditetapkan demi mewujudkan pendidikan bermutu di wilayah Nusa Tenggara Timur.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Permendikbud no 23 tahun 2013 tentang standar pelayanan pelayanan minimal (SPM) yang dibagi dalam beberapa sektor yang meliputi Sektor pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten atau kota dan pelayanan pendidikan dasar dalam satuan pendidikan. upaya yang dilakukan oleh komite sekolah Ules Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar sebagaimana dijelaskan dalam beberapa aspek bidang, yaitu: bidang perencanaan, kurikulum dan evaluasi, bidang pengelolaan fasilitas, bidang pengelolaan pembiayaan, bidang sumber daya manusia.

Penelitian ini memberikan simpulan bahwa implementasi standar pelayanan minimal pendidikan tidak lepas dari peran serta seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan proses pelaksanaan SPM di sekolah pedalaman ULES Nusa Tenggara Timur sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan begitu tidak lagi terjadi model kebijakan yang hanya dimaksudkan untuk mengatasi satu masalah saja dan berdampak kebijakan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad sabri. (2007). *Administrasi pendidikan*. Iain ib press.
- Aisyiah, s., marsidin, s., & sabandi, a. (2020). Kebijakan standar pembiayaan di sekolah dasar. *Edukatif: jurnal ilmu pendidikan*, 2(2), 153–157.
- Edward sallis. (2012). *Total quality management: manajemen mutu pendidikan*, . : ircisod.
- Eti setiawati. (2017). *Studi analisis kebijakan implementasi standar pelayanan minimal (spm) pendidikan dasar – Jurnal Riset Daerah*. 16(3).
- Hasanah, s. N. (2017). Mutu pendidikan sekolah dasar di kabupaten kutai timur. *Syamil: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal Of Islamic Education)*, 5(1), article 1.
- Hermansyah, a. K., sumarsono, a., rahayu, d. P., & fredy, f. (2020). Motivasi tenaga pengajar di pedalaman papua dalam mengajar dan melanjutkan studi pada jurusan pendidikan guru sekolah dasar (sebuah kajian fenomenologis). *Sekolah dasar: kajian teori dan praktik pendidikan*, 29(1), 51–63.
- Hidayati, n., sudarmanto, r. G., & suntoro, i. (2013). Implementasi pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, 1(1), article 1.
- Idrus, m. (2012). Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di daerah. *Psikopedagogia jurnal bimbingan dan konseling*, 1(2), article 2.
- Jamali, y. (2016). *Konsep pengendalian mutu pendidikan*. 2(1).
- Kurniady, d. A. (2011). *Pengelolaan pembiayaan sekolah dasar di Kabupaten Bandung*. 12(1), 18.
- Moerdiyanto \*. (2005). Mekanisme pengawasan yang sinergis implementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan menengah. *Informasi*, 31(1), article 1.
- Muhammad ali. (2008). *Guru dalam proses belajar mengajar*. Sinar Baru Algesindo.
- Mutu rendah pendidikan di ntt, apa pemicunya? (2017, mei 3). *Floresa.co*.
- Nana sujana. (2008). *Pembinaan dan pengembangan kurikulum di sekolah*. Sinar baru algesindo.
- Prasetya, t., faozanudin, m., & puspita, d. R. (2018). Implementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar (spm-dikdas) tingkat smp (studi pada smp n 6 satu atap rembang dan smp n 3 purbalingga). *The Indonesian Journal Of Public Administration (ijpa)*, 4(1), article 1.
- Roudo, m., & saepudin, a. (2008). Meningkatkan pelayanan publik melalui penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (spm): konsep, urgensi dan tantangan. *Riptek*, 2(1), 1–7.



- 988 *Tantangan SPM : Menilik Mutu Pendidikan Sekolah Pedalaman di Ules Nusa Tenggara Timur – Mochamad Fuad Hasan Metarum*  
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.483>
- Sabdaningtyas, I. (2018). Model evaluasi implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan jenjang sd. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 22(1), 70–82.
- Sukaman, s., wahyudi, w., & m.chiar, m. C. (2019). Kebijakan dalam pencapaian standar pelayanan minimal smp di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kubu raya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 8(1), article 1.
- Susanto, s., nawawi, m. A., & rohim, a. (2020). Standar pelayanan minimal pendidikan perspektif revolusi industri 4.0 di sd bayan islamic school. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(3), 1–19.
- Syafingi, h. M. (2017). Konstitusionalitas standar pelayanan minimal. *Jurnal hukum novelty*, 8(2), 216–231.
- Usman, j. (2017). Urgensi manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 219–246.
- Vitri, o., kusumawiranti, r., & suwarjo, s. (2019). Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan dasar di dinas pendidikan Kabupaten Sleman. *Populika*, 7(1), 22–33.